

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang telah dilakukan beberapa peneliti terkait penelitian ini menjadi bahan masukkan dan rujukan bagi peneliti sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian ini sehingga dapat digunakan untuk mengembangkan lagi hasil penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti selanjutnya. Berikut ringkasan hasil – hasil dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul peneliti:

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu

| No | Nama, Judul Penelitian dan Tahun (Tahun) | Variabel | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|---|---|-------------------|---|
| 1 | Saddam Mohammed Mahmood, Ali Ibrahim, Satam Salih Hussein; Dampak adopsi IFRS pada hubungan antara tata kelola perusahaan dan biaya keagenan (2018) | Variabel Independen (X1) Komite Audit, (X2) Ukuran dewan, (X3) Independensi dewan, dan pemisahan ketua dan (X4) kepala eksekutif (CEO) Variable Dependent adalah Y Biaya keagenan Variable Control merupakan penerapan IFRS | Kuantitatif | Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan negatif antara semua mekanisme tata kelola dengan biaya keagenan Hasil tersebut juga menunjukkan korelasi negatif antara adopsi sukarela IFRS dan biaya keagenan Peran SAK telah dengan jelas dibuktikan dalam meningkatkan hubungan antara Komite Audit dan biaya Agensi, |

| | | | | |
|----|--|---|-------------|--|
| | | | | tetapi peran ini tidak signifikan untuk mekanisme tata kelola lainnya. |
| 2. | Putu Mudyasani Sudarma D., I Wayan Putra; Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Pada Biaya Keagenan (2014) | Variabel Independen (X) <i>Good Corporate Governance</i> Variabel Dependen (Y) Biaya Keagenan | Kuantitatif | <i>Good corporate governance</i> berpengaruh negatif pada biaya keagenan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin intensif perusahaan menerapkan <i>good corporate governance</i> maka biaya keagenan semakin rendah |
| 3. | Riri Rofika Ulfa; Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap Biaya Keagenan pada perusahaan sektor Perdagangan di BEI (2016) | Variabel Independen (X) (X1) Dewan Komisaris, (X2) Kepemilikan Manajerial dan (X3) Kepemilikan Institusional Variabel Dependen (Y) Biaya Keagenan dengan memproksikan (Y1) Rasio beban operasional dan (Y2) rasio perputaran aset | Kuantitatif | Variabel Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh signifikan pada biaya agen Variabel Kepemilikan Manajerial pengaruh signifikan pada biaya agen Variabel Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh signifikan pada biaya agen |
| 4. | Fitri Laela Wijayanti; Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan | Variabel independen (X) (X1) Kepemilikan manajerial, (X2) Kepemilikan institusional, | Kuantitatif | Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan Kepemilikan institusional |

| | | | | |
|----|--|---|-------------|---|
| | Institusional, Ukuran Dewan Direksi dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Biaya Keagenan (2015) | (X3) Ukuran dewan direksi, (X4) dewan komisaris Variabel Dependen (Y) Biaya Agen yang diproksikan ke (Y1) <i>Total asset turnover</i> dan (Y2) Rasio biaya operasi | | berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan Jumlah dewan direksi berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan Jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan |
| 5. | Paulus Theodorus Basuki Hadiprajitno; Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan Dan Biaya Keagenan Di Indonesia (<i>Studi Empirik pada Perusahaan di Bursa Efek Indonesia</i>) (2012) | Variabel Independen (X) Institusi Keuangan, Kepemilikan Keluarga, Pemerintah dan asing Variabel Dependen (Y) Biaya Keagenan | Kuantitatif | Hasil Penelitian menunjukkan bahwa struktur kepemilikan yang berpengaruh konsisten menekan biaya keagenan Teori keagenan terbukti berlaku dan mampu menjelaskan praktik operasi perusahaan di Indonesia, kaitannya dengan struktur kepemilikan |
| 6. | Archieta Arum dini Sugama Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Agency Problem Pada Perusahaan Go Pobleic Yang terdaftar di BEI Indonesia 2016 (2018) | X1: kepemilikan manajerial, X2 : kepemilikan keluarga, X3 : kepemilikan institusional, X4 : kepemilikan pemerintah, X5 : kepemilikan asing Y : Agency problem | Kuantitatif | Berdasarkan hasil penelitian bahwa kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional, dan kepemilikan pemerintah tidak memiliki pengaruh yang berarti bagi agency problem. |

| | | | | |
|----|---|--|--------------------|---|
| 7. | <p>2014 Krisnauli, P. Basuki Hadiprajitno Pengaruh Mekanisme Tata Kelola Perusahaan dan Struktur Kepemilikan terhadap <i>Biaya keagenan</i>. Studi Empiris pada perusahaan Manufaktur Terdaftar BEI 2010-2012</p> | <p>Variabel Independen : Dewan komisaris, komisaris independen, dewan direksi, komite audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional. Variabel dependen Biaya keagenan (ATO)</p> | <p>Kuantitatif</p> | <p>Penelitian ini membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran komisaris independen, dan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat biaya keagenan suatu perusahaan.</p> |
| 8. | <p>Sulthon Fatahillah Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Biaya keagenan pada Perusahaan Manufaktur di BEI Th. 2013- 2017 (2018)</p> | <p>X1 : Kepemilikan Institusional, X2 : Kepemilikan Manajerial, X3 : Dewan Komisaris, X4 : Komite Audit Y : Biaya keagenan</p> | <p>Kuantitatif</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap Biaya keagenan, sedangkan dewan komisaris dan komite audit berpengaruh negatif terhadap Biaya keagenan.</p> |
| 9 | <p>Etha Rizki Aryani Pengaruh Good Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan terhadap <i>biaya keagenan</i> (2011)</p> | <p>X1 : Corporate Governance X2: Struktur Kepemilikan Y1 : Biaya keagenan</p> | <p>Kuantitatif</p> | <p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi biaya keagenan adalah variabel kepemilikan BUMN, kepemilikan institusional dan kepemilikan</p> |

| | | | | |
|----|---|--|-------------|---|
| | | | | asing. Sedangkan variabel yang tidak mempengaruhi biaya keagenan adalah komposisi dewan dan kepemilikan terkonsentrasi |
| 10 | Aga Nugroho, Muchammad Syafruddin Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance Terhadap Biaya Keagenan (2012) | X1 : Kepemilikan Pemerintah X2 : Kepemilikan Institusional X3 : Kepemilikan Asing X4 : Kompensasi Manajerial X5 : Kepemilikan Terkonsentrasi X6 : Ukuran Dewan Komisaris Y : Biaya keagenan | Kuantitatif | Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah dewan komisaris, Kepemilikan pemerintah, Kepemilikan institusi, Kepemilikan terkonsentrasi tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan, Kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap biaya keagenan |
| 11 | Nok Mia Audinia Pengaruh Dewan Komisaris, Komite Audit, Dan Utang Terhadap Biaya Keagenan (2017) | X1 : Dewan Komisaris X2 : Komite Audit X3 : Utang Y : Biaya Keagenan | Kuantitatif | Dewan Komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan Komite audit tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan Utang tidak berpengaruh terhadap biaya keagenan yang diprosikan dengan rasio kegunaan asset (Tato) |

Antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaan pada penelitian ini yaitu dengan variabel dependen yaitu Biaya keagenan. Persamaan lainnya yaitu *Good Corporate Governance*. Perbedaan pada penelitian terdahulu yaitu terdapat pada objek dan tahun penelitian. Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan objek perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada periode 2017-2019.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Agent Theory* (Teori Keagenan)

Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak lepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu perbankan dengan pemilik perbankan yang dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan tersebut sejalan dengan *agency theory*. (Jensen & Meckling, 1976) mengutarakan bahwa teori keagenan merupakan suatu teori yang bisa menimbulkan suatu masalah keagenan (*agency problem*) yang disebabkan oleh adanya pemisalah antara agensi dengan prinsipal.

Michael Johnson mengembangkan teori agen yang berpandangan bahwa manajemen akan mengambil keputusan dengan penuh kesadaran bagi kepentingan sendiri, bukan sebagai pihak yang adil dan bijak terhadap pemegang saham (Addiyah & Chairiri, 2014). Hal ini tak lepas dari sifat dasar manusia yaitu (1) Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri. (2) Mengenai persepsi masa mendatang, manusia masih memiliki daya pikir yang terbatas dan (3) Resiko selalu

dihindari oleh manusia (Fatahillah, 2018). Sehingga manusia cenderung memiliki perilaku *oportunistik* yaitu bertindak untuk mencapai kepentingan mereka sendiri.

1. Jenis-jenis Teori Keagenan

Menurut (Kusdarini, 2016), dalam perkembangannya teori agensi ini terbagi menjadi dua jenis yaitu :

a. *Positive Theory of Agency*

Dimana teori ini memfokuskan pada identifikasi situasi ketika pemegang saham dan manajer sebagai agen mengalami konflik dan membatasi *self saving* dalam diri agen.

b. *Principal agen Literature*

Dimana teori ini memfokuskan pada kontrak yang optimal antara perilaku dan hasilnya yang secara garis besar lebih menekankan pada hubungan pemegang saham dan agen.

2. Masalah-masalah Keagenan

(Khomsiyah, 2011) mengemukakan bahwa teori keagenan digunakan untuk mengatasi dua masalah yaitu :

a. Masalah Keagenan yang terjadi pada saat keinginan-keinginan antara pemegang saham dan manajer yang saling berlawanan dan merupakan hal yang sulit bagi pemegang saham untuk melakukan verifikasi apakah agen telah melakukan sesuatu secara tepat.

b. Masalah keagenan timbul disebabkan karena menanggung resiko dimana antara pemegang saham dan manajer memiliki sikap yang berbeda

terhadap resiko. Seperti dalam hubungan keagenan adanya pemisahan antara pemegang saham dengan pengendalian manajer. Dan perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan akan mengakibatkan munculnya perbedaan kepentingan manajer dengan pemegang saham. Hal ini dapat terjadi karena para manajer tidak ikut serta menanggung resiko sebagai akibat dari pengambilan keputusan yang salah serta tidak dapat meningkatkan nilai perusahaan.

3. Biaya Keagenan

Biaya keagenan merupakan suatu konsep tentang biaya pemilik (*principal*) baik organisasi, perseorangan atau sekelompok orang ketika pemilik memilih atau mempekerjakan agen untuk bertindak atas namanya. Menurut pendapat (Sartono, 2012) yang menjelaskan bahwa biaya keagenan merupakan biaya yang harus dikeluarkan guna memperkecil konflik keagenan oleh perusahaan.

4. Jenis-jenis Biaya Keagenan

Tujuan adanya biaya keagenan dikeluarkan adalah untuk meminimalisir konflik keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan ada tiga macam jenis biaya keagenan yaitu :

a. *The Monitoring Expenditure by the principal*. Biaya yang harus dikeluarkan dan ditanggung oleh pemegang saham(prinsipal) untuk memonitoring perilaku manajer(agen)

b. *The Bonding Cost*. Manajer harus menanggung biaya untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

c. *The Residual Cost*. Suatu pengorbanan sebagai akibat dari berkurangnya kemakmuran pemegang saham dari perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer.

2.2.2.1. Pengukuran Biaya Keagenan

Biaya keagenan adalah biaya yang ditanggung oleh pemegang saham jangka panjang dari pada bertindak sesuai kepentingan sendiri. Menurut (Audinia, 2017)

Terdapat beberapa cara untuk menghitung biaya keagenan antara lain :

1. Rasio Kegunaan Aset

Untuk melihat seberapa efektif manajemen mengelola aset perusahaan dapat ditunjukkan dengan rasio kegunaan aset dengan cara menghitung total penjualan dengan total aset. Rasio kegunaan aset yang rendah pada suatu perusahaan dapat diindikasikan dengan memiliki biaya keagenan yang tinggi antara pemegang saham dan manajer. Rasio yang rendah merefleksikan penggunaan aset untuk tujuan yang tidak produktif sedangkan rasio yang tinggi mengidentifikasi kegiatan pengelolaan aset efisien. Dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Total Assets Turn Over} = \frac{\text{Total Penjualan}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2. Rasio Beban Operasional

Rasio beban adalah rasio beban penjualan, umum dan administrasi terhadap penjualan. Rasio ini meliputi seperti gaji, biaya komisi oleh agen. Rasio beban mencerminkan seberapa efektif manajemen pada perusahaan dalam mengontrol biaya operasional. Rasio beban ini mengukur ketidak efisienan dalam mengontrol biaya operasi yang dilakukan oleh pihak manajerial. Jika rasio ini semakin tinggi mengindikasikan biaya operasional tidak efisien, sehingga dapat dikatakan sebagai indikator bila dihubungkan dengan biaya keagenan.

$$\text{Rasio Beban Operasi} = \frac{\text{Jumlah Beban Operasi, Umum dan Administrasi}}{\text{Total Penjualan}} \times 100\%$$

3. Rasio Likuiditas Aset

Rasio ini merupakan rasio kas dan surat berharga terhadap total aset. Jika rasio yang lebih rendah maka secara positif dapat mempengaruhi keringanan biaya keagenan. Manajemen akan memiliki kekurangan kas yang digunakan untuk membuat keputusan yang tidak bermanfaat bagi pemegang saham sehingga kesempatan lebih rendah untuk melakukan perilaku yang berpeluang untuk kepentingan sendiri.

$$\text{Rasio Kas} = \frac{\text{Kas} + \text{Surat Berharga}}{\text{Total Aset}}$$

2.2.2. Good Corporate Governance

Tata kelola perusahaan yang baik adalah suatu rangkaian, proses, kebijakan, aturan dan institusi sehingga tata kelola perusahaan yang baik dapat mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan serta pengontrolan pada suatu perusahaan. Salah satu

prinsip Tata kelola perusahaan yang baik adalah untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan kekuatan, kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *shareholder* khususnya dan *stakeholder* pada umumnya. Yang bertujuan untuk mengatur kewenangan direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan (Listyo, 2013).

Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) *Corporate Governance* bisa didefinisikan sebagai berikut

1. Struktur yang mengatur pola hubungan yang harmonis tentang peran Dewan Komisaris, Direksi, RUPS dan para *stakeholder* lainnya.
2. Suatu sistem *check dan balance* mencakup perimbangan kewenangan atas pengendalian perusahaan yang dapat membatasi munculnya dua peluang pengelolaan yang salah dan penyalahgunaan asset perusahaan
3. Suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaian dan pengukuran kinerja.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan adanya suatu sistem. Menurut (OECD, 2004) *corporate governance* diperlukan sistem yang dipergunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan bisnis perusahaan. Sehingga dalam pembagian tugas, hak dan kewajiban diatur oleh *corporate governance* termasuk mereka yang berkepentingan terhadap kehidupan perusahaan termasuk pemegang saham, Dewan Pengurus, para manajer dan semua anggota *stakeholder* non pemegang saham. Jadi dengan adanya pembagian tugas, hak dan kewajiban serta ketentuan dan prosedur

pengambilan keputusan penting, perusahaan diharapkan mempunyai pegangan untuk menentukan sasaran usaha (*corporate objectives*) dan strategi mencapai sasaran tersebut (Lisma, 2011).

2.2.1.1. Mekanisme Good Corporate Governance

Mekanisme *Good Corporate Governance* menggunakan pengukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Indrawati, 2019) dan (Fatahillah, 2018).

1. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada Direksi. Salah satu mekanisme memonitor kinerja manajer adalah membentuk dewan komisaris. Sesuai dengan UU No 40 Tahun 2007 Dewan Komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen. Dewan Komisaris ditunjuk untuk bertanggungjawab mengawasi penerapan GCG oleh pemegang saham.

Apabila dikaitkan dengan biaya keagenan dewan komisaris akan lebih mudah mengawasi jalannya operasional perusahaan serta memastikan bahwa manajer benar-benar melakukan hal-hal yang sesuai dengan keinginan pemegang saham. Keefektifan dewan komisaris mengindikasikan tingginya perputaran asset. Jika semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pengawasan manajemen akan bertindak sesuai dengan permintaan pemegang saham serta dapat meningkatkan rasio perputaran

asset dan dapat menekan biaya keagenan (Hadiprajitno & Krisnauli, 2014). Dewan Komisaris diukur dengan menghitung jumlah anggota dewan komisaris pada suatu perusahaan yaitu

$$\text{Dewan Komisaris} = \text{In } \Sigma \text{ Komisaris Internal} + \text{Komisaris}$$

2. Komite Audit

Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit yang bertujuan untuk melakukan pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu mengenai masalah pengendalian, Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen. Ukuran komite audit

$$\text{Komite Audit} = \text{In } \Sigma \text{ Anggota Komite Audit}$$

3. Kepemilikan Institusional

Pada akhir tahun pihak institusi memiliki kepemilikan institusional berupa persentase saham (Purno, 2013). Sehingga membuat kepemilikan institusional mempunyai peran serta dianggap mempunyai kemampuan untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen. Sehingga kepemilikan institusional dapat mengurangi perilaku *oppurtunity* manajer yang dapat mengurangi biaya keagenan (Fatahillah, 2018). Selain itu juga kepemilikan agen juga

mempunyai peran sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal, dengan kepemilikan saham yang besar mempunyai insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan (Kumala, 2014). Rumus yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\Sigma \text{ Saham yang dimiliki}}{\Sigma \text{ Saham yang beredar}} \times 100\%$$

4. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan pemegang saham dari manajemen yang terdiri dari direktur dengan menggunakan persentase jumlah saham manajemen terhadap jumlah seluruh saham yang beredar. Kepemilikan manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Jika kepemilikan saham oleh direksi dan komisaris dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer sehingga dapat mengurangi biaya keagenan. Variabel ini diukur dengan mengidentifikasi daftar struktur kepemilikan manajerial

$$\text{Kepemilikan Manajerial} = \frac{\Sigma \text{ Saham yang dimiliki manajemen}}{\Sigma \text{ Saham yang beredar}}$$

Menurut pendapat (Arbaina, 2012) unsur yang dibutuhkan dalam menerapkan *Corporate Governance* pada perbankan adalah pemegang saham, direksi, dewan komisaris, Manajer, Karyawan, Sistem remunerasi berdasarkan kinerja dan komite audit. Selain itu juga untuk mendukung keberhasilan dalam

menerapkan GCG perlu adanya langkah penting dalam membangun kepercayaan dalam membangun kepercayaan pasar dan mendorong investasi untuk meningkatkan daya penjualan. Disisi lain menurut penelitian yang dilakukan (Taufiq, et al., 2014) indikator yang digunakan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari kepemilikan direksi, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan komite audit.

Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *good corporate governance* adalah :

- a. Mengurangi *biaya keagenan*, biaya yang terjadi karena adanya wewenang yang disalahgunakan, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
- b. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik yang mampu meminimalisir resiko
- c. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- d. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris, direksi dan RUPS
- e. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham untuk membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundangan-undangan yang berlaku
- f. Menjaga *Going Concern*(kelangsungan hidup) Perusahaan.

2.2.3. Perbankan

Suatu Badan usaha yang berkegiatan dimulai dari jasa penukaran uang yang selanjutnya berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau sekarang disebut kegiatan simpanan. Kegiatan peminjaman uang dari masyarakat, dipinjamkan kembali oleh perbankan ke masyarakat yang membutuhkan. Menurut Kashmir (2013) perbankan dikatakan sebagai suatu kegiatan menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*lending*). sedangkan menurut Darmawi (2012) perbankan merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari pengertian diatas perbankan dapat disimpulkan bahwa usahanya meliputi tiga kegiatan yaitu kegiatan menghimpun dana, kegiatan menyalurkan dana, kegiatan memberikan jasa. Kegiatan pokok Perbankan diantaranya adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Sedangkan memberikan jasa merupakan kegiatan pendukung bank.

Selain itu menurut pengertian para ahli berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang kemudian dirubah menjadi Undang-undang No 10 Tahun 1998 dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bank adalah badan usaha yang kegiatan salah satunya adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.
- b. Bank Umum yang dapat memberikan jasa dalam transaksi pembayaran

c. Bank Perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

1. Tugas dan Fungsi Bank

Menurut Undang-undang RI No.19 tahun 1998 adalah membantu pemerintah dalam hal mengatur, menjaga dan memelihara stabilitas nilai rupiah, mendorong kelancaran produksi dan pembangunan serta memperluas kesempatan kerja guna peningkatan taraf hidup banyak orang. Sedangkan pada umumnya Bank berfungsi sebagai berikut :

- a. Menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi
- b. Menciptakan uang
- c. Yang menawarkan jasa-jasa keuangan lain
- d. Untuk menjalankan fungsinya maka Bank juga sebagai penghimpun dana sehingga bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber antara lain :

- a). Dana yang bersumber dari bank sendiri yang dapat berupa setoran modal waktu pendirian.
- b). Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
- c). Dana yang berasal dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Likuiditas dan *Call Money* (Data yang

sewaktu-waktu dapat ditarik oleh Bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Contohnya seperti bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, disebabkan karena diantara lain macetnya pembayaran kredit atau banyak masalah pada pengkreditan.

e. Penyalur dana-dana bertugas sebagai penyalur dana dari bank yang akan disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, serta penyertaan dan pemilikan harta tetap.

f. Pelayan jasa Bank adalah yang bertugas sebagai pelayan lalu lintas pembayaran uang seperti pengiriman uang, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

2. Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis Perbankan di Indonesia jika ditinjau dari berbagai segi antara lain menurut antara lain (Kashmir, 2013):

a. Dilihat dari segi fungsinya

a). Bank Umum

Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam transaksi pembayaran yang bersifat umum.

b). Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari segi kepemilikannya dibagi menjadi :

a). Bank milik Pemerintah

Bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah. Seperti Bank Negara Indonesia 46 (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI)

b). Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini secara seluruh atau sebagian besar dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendirian pun didirikan oleh swasta begitu juga dengan keuntungannya. Contohnya Bank Muamalat, Bank Central Asia.

c). Bank milik koperasi

Bank ini berdasarkan kepemilikan saham-saham dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Seperti Bank Umum Koperasi Indonesia.

d). Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan jenis cabang dari bank luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Kepemilikannya pun jelas dimiliki oleh luar negeri contohnya Bank Amerika, Bank of Tokyo.

e). Bank milik campuran

Bank campuran ini secara kepemilikan saham dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia contohnya Bank Niaga, Bank Sakura Swadarma.

c. Dilihat dari segi status

Kalau dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank pada umumnya dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan status ini yang menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a). Bank Devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, *travelers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit*. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b). Bank Non Devisa

Merupakan Bank yang belum mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

d. Dilihat dari segi cara menentukan harga

a). Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula

harga beli untuk produk pinjamannya (Kredit) juga ditentukan berdasarkan suku bunga tertentu.

b). Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

2.2.4. Bursa Efek Indonesia

Bursa efek atau bursa saham (*stock exchange*) adalah sebuah pasar yang berhubungan dengan pembelian dan penjualan efek perusahaan yang sudah terdaftar di bursa tersebut. Jadi bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Jadi pengertian Bursa efek yang lain diantaranya yaitu :

1. Bursa efek adalah sebuah pasar yang terorganisir dimana para pialang melakukan transaksi jual beli saham/surat berharga dengan berbagai perangkat aturan yang ditetapkan di bursa efek tersebut.
2. bursa efek adalah tempat pertemuan pencari modal dengan pihak yang memiliki uang dengan tujuan investasi.

Dalam menyelenggarakan dan menyediakan system atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek. Bursa efek membentuk sebuah pasar yang disebut dengan sebuah pasar modal. Pasar modal pada dasarnya sama

seperti pasar pada umumnya yaitu tempat bertemunya para penjual dan pembeli. Dipasar modal yang diperjualbelikan adalah modal yang berupa hak pemilikan perusahaan dan surat pernyataan hutang perusahaan.

2.3. Pengaruh Antar Variabel

2.3.1. Pengaruh Dewan Komisaris terhadap biaya keagenan

Menurut (Coller & Gregory, 1999) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan monitoring akan semakin efektif jadi semakin besar ukuran dewan komisaris dapat mengurangi biaya keagenan. Menurut hasil penelitian Nok Mia Audinia (2016) menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan yang artinya bahwa jika ukuran yang dimiliki dewan komisaris besar maka semakin rendah biaya keagenannya. Sehingga peneliti mengambil hipotesis sebagai berikut :

H1 = Dewan Komisaris berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan

2.3.2. Pengaruh Komite Audit terhadap biaya keagenan

Ukuran komite audit mengindikasikan jumlah anggota komite dalam suatu perusahaan. Menurut (Sulthon, 2018) berpendapat bahwa keberadaan komite audit sangat penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan terutama aspek penjualan. Semakin besar ukuran komite audit dalam mengendalikan dan memantau manajemen puncak maka mengindikasikan semakin berkurangnya biaya keagenan. Hal ini sejalan dengan penelitian Linda (2012) komite audit berpengaruh negatif

terhadap biaya keagenan karena hal ini diindikasikan bahwa keberadaan komite audit mampu memonitoring pihak manajer perusahaan sehingga jalinan hubungan dengan para dewan dapat menjadi efektif yang dapat meminimalisir biaya keagenan yang ditimbulkan. Sedangkan penelitian Hastori et. Al. (2015) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap biaya keagenan. Dikarenakan bahwa komite audit tidak efektif dalam mengawasi kinerja manajer sehingga tidak mampu mengurangi biaya keagenan.

H2 = Komite Audit berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan

2.3.3. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap biaya keagenan

Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen karena semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan dan diharapkan juga dapat bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen sehingga bisa mengurangi biaya keagenan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wijayanti (2015) membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap biaya keagenan hal ini dikarenakan semakin besar kepemilikan institusional maka akan mengurangi biaya keagenan. Semakin tinggi kepemilikan institusional dianggap mampu mengurangi biaya keagenan.

H3 = Kepemilikan institusional berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan

2.3.4. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap biaya keagenan

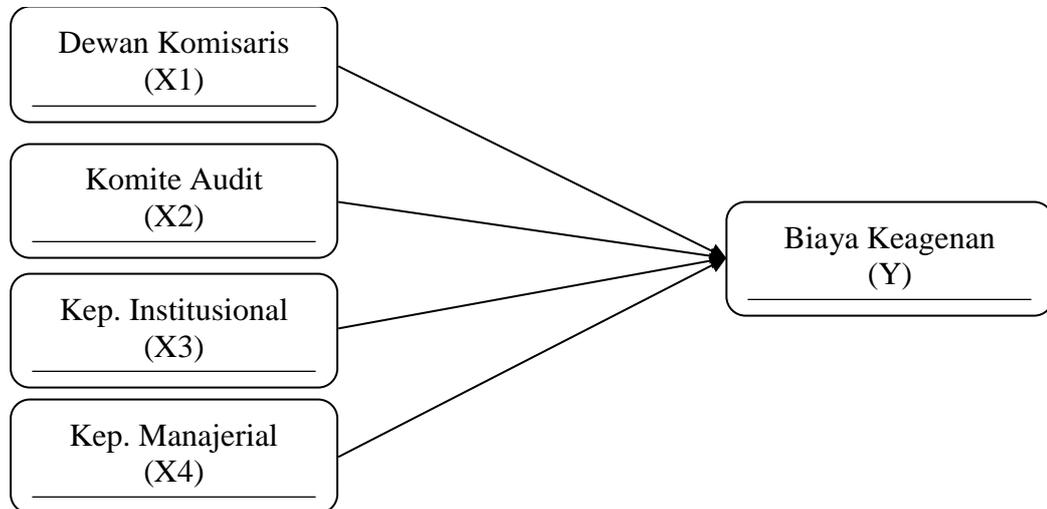
Menurut Jensen (1993) kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka cenderung berusaha lebih giat untuk menekan biaya keagenan. Hal ini juga didukung dengan penelitian Wijayanti (2015) membuktikan bahwa kepemilikan manajer berpengaruh negatif terhadap biaya keagenan dengan menunjukkan bahwa semakin besar jumlah kepemilikan saham manajerial diyakini mampu mengurangi biaya keagenan. Hal ini sejalan dengan penelitian Krisnauli (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tingkat biaya keagenan pada suatu perusahaan

H4 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan

2.4. Kerangka Konseptual Penelitian

Rerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori hubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting (Sugiyono, 2012). Jadi kerangka konseptual atau kerangka berfikir merupakan hubungan antar avriabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori dan didukung dengan penelitian terdahulu, sehingga dapat disusun sebuah kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.1. Kerangka Konseptual



2.5. Hipotesis

Hipotesis merupakan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2012). Berdasarkan latarbelakang, landasan teori disertai dengan bukti empiris penelitian terdahulu, maka dalam penelitian ini mengambil hipotesis :

H1 = Dewan Komisaris berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan

H2 = Komite Audit berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan

H3 = Kepemilikan institusional berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan

H4 = Kepemilikan Manajerial berpengaruh dan signifikan terhadap Biaya Keagenan